BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Purwakarta merupakan wilayah memiliki kedudukan strategis dalam posisi nasional terletak di antara pusat kegiatan nasional (PKN) Jakarta-Bandung-Cirebon, karena wilayahnya dilalui jalur Jakarta-Bandung sebagai pusat pertumbuhan wilayah nasional dan regional serta adanya faktor kedekatan jarak dan akses yang memadai.

Kabupaten Purwakarta merupakan bagian wilayah Propinsi Jawa Barat (Lihat gambar 19 pada lampiran peta) yang terletak di antara 107^0 30'-107^0 40' Bujur Timur dan 6^0 25'-6^0 45' Lintang.Selatan, secara Administratif Kabupaten Purwakarta (Lihat gambar 20 pada lampiran peta) mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

a. Bagian Barat dan bagian wilayah Utara berbatasan dengan Kab. Karawang.

b. Bagian Utara dan sebagian wilayah bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Subang.

c. Bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung.

d. Bagian Barat daya berbatasan dengan Kabupaten Cianjur.

Luas wilayah Kabupaten Purwakarta tercatat 97.172 Ha / 971.72 Km^2 atau 2,81 persen dari luas wilayah propinsi Jawa Barat. Kabupaten Purwakarta mempuyai 17 Kecamatan dengan 192 Desa / Kelurahan.

Dengan Luas wilayah 97.172 Ha / 971,72 Km^2 terbagi menjadi 17 Kecamatan (Lihat gambar 21 pada lampiran peta) sesuai dengan Perda nomor 22 tahun 2000 yaitu :

1. Kecamatan Purwakarta : 24, 83 Km^2
2. Kecamatan Jatiluhur : 60, 11 Km^2
3. Kecamatan Bungursari : 54, 66 Km^2
4. Kecamatan Babakan Cikao : 42, 40 Km^2
5. Kecamatan Campaka : 43, 63 Km^2
6. Kecamatan Cibatu : 56, 50 Km^2
7. Kecamatan Pasawahan : 36, 96 Km^2
8. Kecamatan Pondoksalam : 44, 08 Km^2
9. Kecamatan Wanayasa : 56, 55 Km^2
10. Kecamatan Kiarapedes : 52, 16 Km^2
11. Kecamatan Bojong : 68, 69 Km^2
12. Kecamatan Darangdan : 67, 39 Km^2
13. Kecamatan Plered : 31, 48 Km^2
14. Kecamatan Tegalwaru : 73, 23 Km^2
15. Kecamatan Sukatani : 95, 43 Km^2
16. Kecamatan Maniis : 71, 64 Km^2
17. Kecamatan Sukasari : 92, 01 Km^2

Purwakarta memiliki kedudukan yang strategis karena wilayahnya dilalui jalur Jakarta-Bandung yang memiliki kapasitas pergerakan yang tinggi, hal ini

tidak terlepas dari Jakarta-Bandung sebagai pusat pertumbuhan wilayah nasional dan regional serta adanya faktor kedekatan jarak dan aksesibilitas yang memadai.

Kondisi Tofografi dan Iklim, ditinjau dari aspek geografis letak kabupaten Purwakarta dapat dibagi atas beberapa wilayah, yaitu bagian Utara, Barat, Selatan dan Timur. Wilayah bagian Utara mencakup kecamatan Campaka, Bungursari, Cibatu, Purwakarta, Babakan Cikao, Pasawahan, Pondok Salam, Wanayasa dan Kiarapedes dimana wilayahnya sebagian besar terletak pada ketinggian antara 25-500 m di atas permukaan laut (dpl), wilayah Barat meliputi kecamatan Jatiluhur dimana bagian yang merupakan permukaan air danau Ir. H. Juanda dan Sukasari mempunyai ketinggian 107 m (dpl.), sedangkan tanah daratan di sekitarnya berada pada ketinggian antara 400 m (dpl), Kabupaten Purwakarta bagian Selatan dan Timur wilayahnya meliputi kecamatan Plered, Maniis, Tegalwaru, Sukatani, Darangdan dan kecamatan Bojong dengan ketinggian lebih dari 200 m (dpl).

Tekstur tanah secara garis besar keadaan tanah/tekstur tanah Kabupaten Purwakarta bervariasi dari yang halus, sedang, dan sampai kasar dengan distribusi berikut ini :

- Tanah dengan tekstur halus yang relatif peka terhadap erosi seluas 25,92 % lokasinya merata disetiap kecamatan.
- Tanah dengan tekstur sedang, cukup baik untuk pertumbuhan akar tanaman, tetapi agak peka terhadap bahaya erosi, luasnya mencapai 73,23 % tersebar merata disetiap kecamatan.
- Tanah dengan tekstur kasar sangat peka terhadap erosi yang merupakan tekstur tanah yang paling sempit arealnya yaitu hanya seluas 0,85 % dari luas

kabupaten Purwakarta, jenis tanah ini sebagian besar berlokasi di Kecamatan Jatiluhur, Plered, Maniis, dan Tegalwaru.

Kemiringan dan Ketinggian Tanah Wilayah Kabupaten Purwakarta berdasarkan kemiringan tanahnya dibagi menjadi empat bagian wilayah yaitu :

- Wilayah dengan lereng datar (0-2 %) meliputi 28,5 % dari luas wilayah yang tersebar pada bagian wilayah Kecamatan Campaka, Cibatu, Pasawahan, Bungursari, Purwakarta, Tegalwaru, Jatiluhur, dan Babakan Cikao.
- Wilayah dengan lereng agak miring (2-15 %) merupakan wilayah yang terluas yaitu 33,54 % dari luas wilayah Kecamatan Campaka, Cibatu, Pasawahan, Pondok Salam, Bungursari serta sebagian kecil pada wilayah Kecamatan Bojong, Jatiluhur, Plered dan Sukatani.
- Wilayah dengan lereng miring (15-40 %) sebesar 17,48 % dari luas wilayah Kabupaten Purwakarta yang tersebar sebagian pada wilayah kecamatan Bojong Darangdan, Campaka, Sukasari, Tegalwaru, Wanayasa, Kiarapedes, Bungursari dan Cibatu.
- Wilayah dengan lereng curam > 40 % seluas 29,73 % dan luas wilayah yang tersebar disebagian wilayah kecamatan Wanayasa, Bojong, Plered, Maniis, Darangdan, Sukasari, Sukatani, dan Jatiluhur.

Adapun ketinggian tanah di Kabupaten Purwakarta dapat diklasifikasikan menjadi lima golongan ketinggian tanah yaitu :

- Wilayah dengan ketinggian tanah < 100m dpl, terletak sebagian besar di sebelah utara Kabupaten Purwakarta Pada kecamatan Bungursari, Campaka, Cibatu dan Purwakarta.

- Wilayah dengan ketinggian antara 100-500m dpl, terletak sebagian besar pada bagian tengah Kabupaten Purwakarta, Pada kecamatan Maniis, Tegal waru, Sukatani, Sukasari, Darangdan, Pasawahan, Pondok salam, dan Plered.
- Wilayah dengan ketinggian antara 500-1.000m dpl terletak sebagian besar berada pada selatan Kebupaten Purwakarta, Pada kecamatan Sukatani, Plered dan Sukasari
- Wilayah dengan ketinggian antara 1.000-1.500m dpl, terletak sebagian besar di kecamatan Wanayasa, Maniis dan Kiara Pedes.
- Wilayah dengan ketinggian > 1.500m dpl terletak sebagian besar di kecamatan Wanayasa.

Iklim dan curah hujan Kabupaten Purwakarta berdasarkan hasil pemantauan dari Perusahaan Umum Jasa Tirta II pada 9 lokasi stasiun hujan yang tersebar pada 9 kecamatan, seperti yang terjadi pada tahun 2001 dimana curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari, April, Oktober, dan November sedangkan pada tahun 2002 terjadi pada bulan Januari, Pebruari, Maret dan Desember. Dari kesembilan lokasi pemantauan hujan tersebut dapat diketahui bahwa curah hujan di kecamatan Wanayasa merupakan curah hujan yang tertinggi sepanjang tahun 2002 yaitu sebanyak 4.501mm, Kecamatan Wanayasa juga tercatat memiliki hari hujan yang paling banyak yaitu 158 hari setiap tahun.

Iklim merupakan keseluruhan syarat-syarat atmosfir suatu daerah, yang memungkinkan kelangsungan hidup bagi manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan didaerah itu. Daerah Jawa Barat (kabupaten Purwakarta termasuk di dalamnya) memiliki musim yang bergantian setiap enam bulan sekali, hal ini terjadi akibat

adanya perbedaan temperatur antara lautan dan benua yang diakibatkan oleh tekanan (angin Barat Daya dan Barat Laut). Angin yang datang dari laut mengandung uap air yang mendatangkan hujan, sedangkan angin darat (angin Timur laut dan Tenggara) tertiup dari Australia mengakibatkan terjadinya musim kemarau di daerah Jawa Barat. Keadaan iklim di wilayah Kabupaten Purwakarta berdasarkan klasifikasi Schmid dan ferguson termasuk iklim tipe A yang sangat basah dengan curah hujan antara 2.500 s/d 5.000 mm per tahun, kondisi iklim tersebut sangat menunjang bagi kegiatan pertanian khususnya pertanian lahan basah dan kecukupan akan air serta tersedianya sumber daya air.

Kondisi perekonomian Kabupaten Purwakarta memiliki basis perkembangan yang cukup kuat dan memiliki ketersediaan sumber daya alam yang cukup besar, basis perkembangan tersebut diperlihatkan dengan struktur perekonomian Kabupaten Purwakarta tahun 1997-2000 menunjukan pertumbuhan yang cukup jelas terutama untuk sektor sekunder dan tersier. Sumber daya alam yang tersedia meliputi berbagai tanaman pangan dan hasil pertanian yang dapat dijadikan bahan baku dalam pengembangan kegiatan industri yang berbasis pertanian (Agro industri). Salah satu faktor dominan yang menjadi andalan adalah sub-sektor perikanan, selain mencukupi kebutuhan lokal juga menjadi komoditas pasokan keberbagai kabupaten di Jawa Barat.

Sektor lain memiliki potensi untuk dikembangkan adalah sektor industri dimana di Kabupaten Purwakarta terdapat 182 perusahaan industri besar dan telah menampung kurang lebih 45.000 tenaga kerja. Namun sektor ekonomi dalam perkembangannya memiliki permasalahan dimana pertumbuhan nyata sektor

tersebut menunjukan nilai minus dalam kurun waktu 1997-2000 yang disebabkan oleh krisis ekonomi nasional yang juga menimpa kinerja perekonomian, dimana struktur perekonomian mulai bergeser dari sektor primer (Pertanian dan Penggalian) ke sektor non agraris (Perdagangan dan Jasa) yang diindikasikan menurunnya pertumbuhan sektor primer. Pergeseran struktur ekonomi meningkatkan arus migrasi ke Kabupaten Purwakarta sehingga menciptakan peluang terjadinya *Ekonomi Lost* (ekonomi hilang) karena terjadi pembelanjaan dana di luar daerah oleh pendatang yang mendapatkannya di Kabupaten Purwakarta.

Struktur perekonomian Kabupaten Purwakarta dicerminkan oleh data mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan demikian akan terlihat gambaran perekonomian Kabupaten Purwakarta, baik secara stuktur maupun perkembangan sektor-sektornya, untuk mengetahui secara jelas kondisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Purwakarta dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2001 (Lihat Tabel 1.1 dan Tabel. 1.2) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dan harga berlaku.

Tabel 1. 1
PRODUK DOMESTIK REGIONEL BRUTO KABUPATEN PURWAKARTA
ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA
TAHUN 1998-2001 (DALAM JUTAAN RUPIAH)

No	Lapangan usaha	1998	1999	2000	2001
1	2	3	4	5	6
1	Pertanian	452.832,02	458.812,47	502.487,30	553.970,11
2	Pertambangan dan Penggalian	11.383,69	12.065,27	13.743,55	15.676,72
3	Industri Pengolahan	1.635.648,99	1.757.578,53	2.026.995,99	2.396.990,22

Lanjutan tabel 1.1

1	2	3	4	5	6
4	Listrik, Gas & Air bersih	103.094,41	116.737,54	129.266,87	155.261,56
5	Bangunan & Konstruksi	124.894,11	1333.386,91	149.806,84	162.454,84
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	989.238,48	1.018.726,77	1.109.164,66	1.306.627,68
7	Pengangkutan dan Komunikasi	88.861,03	93.118,55	117.070,03	137.436,14
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa	170.701,87	182.308,00	211.694,80	252.189.93
9	Jasa – jasa	143.250,41	172.398,57	191.510,67	246.297,70
	Jumlah PDRB	3.719.905,01	3.945.132,61	4.451.740.71	5.116.904,90

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta 2002

Tabel. 1.2

PRODUK DOMESTIK REGIONEL BRUTO KABUPATEN PURWAKARTA
ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA
TAHUN 1998-2001 (DALAM JUTAAN RUPIAH)

No	Lapangan usaha	1998	1999	2000	2001
1	Pertanian	182.233,49	183.885,91	186.123,55	181.551,76
2	Pertambangan dan Penggalian	5.440,17	5.550,06	5.667,21	5.746,18
3	Industri Pengolahan	799.553,93	813.597,83	837.446,17	866.541,40
4	Listrik, Gas & Air bersih	72.440,78	80.982,64	84.345,60	87.867,34
5	Bangunan dan Konstruksi	58.032,34	59.117,54	61.638,74	61.169,79
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	480.400,81	487.586,89	505.700.37	526.292.71
7	Pengangkutan dan Komunikasi	51.300,80	51.953,24	50.478,39	53.581,84
8	Keuangan, Persewaan dan jasa	101.497,55	104.061,88	108.508,25	114.660,07
9	Jasa – jasa	107.534,94	108.585,93	112.703,28	126.314,86
	Jumlah PDRB	1.858.514,81	1.895.321,92	1.952.611,56	2.023.685,95

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta 2002

Perkembangan perekonomian kabupaten Purwakarta tidak lepas dari peran investor yang menanamkan investasinya, investor yang berperan tersebut tidak hanya dari dalam negeri saja atau penanaman modal dalam negeri (PMDN) tetapi dari luar negeri juga ikut berperan serta atau penanaman modal asing (PMA). Investor dalam negeri (PMDN) menanamkan investasinya pada tahun 2001 sebesar Rp. 794.925.348.541,00. pada tahun 2002 sebesar Rp. 794.925 .348.541,00. Sedangkan pada tahun 2003 sebesar Rp. 814.967.469.016,00 atau naik sebesar 2,52 % di bandingkan tahun sebelumnya.

Sektor kegiatan penanaman modal dalam negeri yang diminati atara lain

- Sektor Industri : 90,1 %
- Sektor Jasa : 4,5 %
- Sektorr Peternakan : 4,5 %

Investor luar negeri atau penanaman modal asing (PMA) menanamkan investasinya pada tahun 2001 sebesar US $ 7.660.786.261,91. Pada tahun 2002 sebesar US $ 7.674.287.546,15 atau naik sebesar 0,17 % dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan tahun 2003 sebesar US $ 8.117.090.349,00 atau naik sebesar 5,77 % di bandingkan tahun sebelumnya.

Sektor kegiatan penanaman modal asing antara lain:

- Sektor Industri : 95 %
- Sektor Perdagangan : 1,7 %
- Sektor Agro : 1,7 %
- Sektor Peternakan : 1,7 %

Kondisi sosial kependudukan menurut data tahun 2001 jumlah penduduk kabupaten Purwakarta adalah 716.065 jiwa, jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki masih mendominasi jumlah penduduk secara keseluruhan yaitu: 359.973 jiwa atau 50,27 % dengan jumlah penduduk perempuan sebesar 356.029 jiwa atau 49,73 %. Jumlah penduduk terbesar terdapat di kecamatan Purwakarta dan yang terkecil di kecamatan Sukasari, yaitu 130.682 jiwa dan 13.216 jiwa atau 18,25 % dan 1,85 %. Perkembangan penduduknya kurun waktu 5 tahun terakhir dari tahun 1998 sampai 2001 sebesar 3,407 % per tahun (Lihat tabel 1.3)

Tabel 1. 3
PERTUMBUHAN PENDUDUK KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 1998 – 2001

Tahun	Pertumbuhan
1998	0,380
1999	0,806
2000	8,609
2001	3,831
Rata – rata	4,407

Sumber : Kabupaten Purwakarta dalam angka 2002

Kondisi penyebaran dan kepadatan penduduk tahun 2001 terkonsentrasi pada dua kecamatan, yaitu kecamatan Purwakarta dengan kepadatan penduduk sebesar 5,263 Jiwa / Km^2 dan persebaran penduduk sebesar 18,25 % dari jumlah penduduk keseluruhan. Kecamatan Plered kepadatan penduduk sebesar 1,978 Jiwa/Km^2, dengan persebaran penduduk sebesar 8,69 % dari jumlah penduduk keseluruhan (Lihat tabel 4.4), sedangkan 15 (lima belas) kecamatan lainnya memiliki kepadatan penduduk (dibawah 1000 jiwa/Km^2). Dengan jumlah penduduk yang cukup besar tersebut memiliki potensi dalam segi kuantitas

sumber daya manusia, hal tersebut ditunjang dengan tingginya tingkat kesempatan kerja yaitu 89,89% atau terdapat 90 orang yang bekerja dari setiap 100 orang angkatan kerja yang ada.

Namun disamping potensi-potensi tersebut sektor sosial juga memunculkan berbagai persoalan salah satunya adalah tingkat penyebaran penduduk yang kurang merata dan masih terkonsentrasi pada kecamatan-kecamatan yang merupakan pusat-pusat permukiman utama, perpindahan mata pencaharian penduduk dari sektor agraris ke sektor urban yang ditunjukan dengan menurunnya laju pertumbuhan penduduk yang bekerja pada sub sektor pertanian tanaman pangan.

Tabel. 1.4
KEPADATAN PENDUDUK KABUPATEN PURWAKARTATAHUN 2001

No	Kecamatan	Luas wilayah (Km^2)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa /Km^2)	Penyebaran (%)
1	Jatiluhur	60.11	51.598	858	7,21
2	Suka sari	92.01	13.216	144	1,85
3	Maniis	71.64	26.350	368	3,68
4	Tegalwaru	73.23	40.434	552	5,65
5	Plered	31.48	62.257	1.978	8,69
6	Sukatani	95.43	55.904	586	7,81
7	Darangdan	67.39	52.580	780	7,34
8	Bojong	68.69	40.155	585	5,61
9	Wanayasa	56.55	34.380	608	4,80
10	Kiara Pedes	52.16	22.866	438	3,19
11	Pasawahan	36.96	35.161	951	4,91
12	Pondok Salam	44.08	24.396	553	3,41
13	Purwakarta	24.83	130.682	5.263	18,25
14	Babakan Cikao	42.40	35.175	830	4,91
15	Campaka	43.60	31.141	714	4,35
16	Bungursari	54.66	36.007	659	5,03
17	Cibatu	56.50	23.765	421	3,32
Jumlah		971.72	716.065	737	100

Sumber : Kabupaten Purwakarta dalam angka 2002

Struktur mata pencaharian di kabupaten Purwakarta masih didominasi oleh kegiatan pertanian, 263.563 ribu tenaga kerja yang bekerja pada sektor pertanian sebesar 31.19 %, sektor perdagangan 18.50 %, jasa-jasa sebesar 15.13 % dan lain-lain 19.63 %. Adapun komposisi tenaga kerja sektoral menurut jenis kelamin diperoleh gambaran, bahwa laki-laki dan perempuan jauh berbeda yaitu sektor pertanian 20.97 % laki-laki dan 0.24 % perempuan, pada sektor industri laki-laki sebesar 12 % dan perempuan 3.56 %, pada sektor perdagangan laki-laki sebesar 13.70% dan perempuan 4.82 %, begitu pula untuk sektor jasa-jasa dan lainnya komposisi laki-laki lebih tinggi dari perempuan dalam bekerja.

Kondisi Pendidikan Kabupaten Purwakarta sudah cukup merata dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah tinggi. Dalam rangka menuntaskan wajar Dikdas 9 tahun pemerintah daerah memprogramkan tuntas pada tahun 2010. Selanjutnya di bawah ini keadaan pendidikan di Kabupaten Purwakarta :

Tabel 1.5
JUMLAH SEKOLAH DI KABUPATEN PURWAKARTA

NO	KECAMATAN	SD	SMP	SMA	SMEA	STM	MTS	MA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Purwakarta	82	8	8	5	5	3	4
2	Jatiluhur	34	2	1	-	-	2	-
3	Bungursari	17	2	1	-	-	-	-
4	Babakancikao	18	2	-	1	1	-	-
5	Campaka	18	2	1	-	1	1	-
6	Cibatu	15	2	1	-	2	2	1
7	Pasawahan	26	2	1	-	-	1	-
8	Pondoksalam	16	1	-	-	-	1	-
9	Wanayasa	22	1	1	-	-	1	1
10	Kiarapedes	17	2	-	-	-	1	-
11	Bojong	25	2	-	-	-	1	-
12	Darangdan	36	3	1	-	-	-	-

Lanjutan Tabel 1.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Plered	30	2	-	1	-	2	1
14	Tegalwaru	24	2	1	-	-	-	-
15	Sukatani	35	1	1	1	1	1	-
16	Maniis	17	2	-	-	-	-	-
17	Sukasari	11	2	-	-	-	-	-
Jumlah		443	37	17	8	10	16	7

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta 2003-2004

Di samping pendidikan dasar dan menengah Kabupaten Purwakarta juga memiliki beberapa sekolah tinggi yaitu : 1). STAI DR.KH. EZ Muttaqien, 2). STT DR. KH. EZ. Muttaqien, 3). STIE. DR. KH. EZ Muttaqien, 4). STH Purwakarta, 5). STT Wastu Kencana, 6). UPI kampus Purwakarta, 7). AMIK Purwakarta, 8). Polibisnis Purwakarta, 9). STIE Wikara yang menampung mahasiswa dari kabupaten Purwakarta. Subang, Kerawang, dan Bekasi.

Kabupaten Purwakarta merupakan lokasi yang menjadi pilihan penulis sebagai tempat melaksanakan penelitian. Kota ini terkenal sebagai kota pelajar, sejak zaman Belanda didirikan sekolah normal pada tahun 1913. Pada zaman pendudukan Jepang sekolah ini digunakan sebagai kamp militer. Sesudah zaman kemerdekaan digunakan untuk sekolah guru B (SGB), pada tahun 1956 berubah menjadi sekolah guru A (SGA) lama belajar 3 tahun, dan tahun 1965 nama SGA berubah menjadi sekolah pendidikan guru (SPG) lama belajar 3 tahun. Selanjutnya pada tahun 1991 SPG ditutup dan berubah menjadi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Diploma 2, program ini merupakan integrasi dari Dikdasmen ke Dikti dipercayakan tanggungjawab pengelolaannya pada IKIP Bandung UPP PGSD Purwakarta. Pada saat ini UPP D–2 PGSD IKIP Bandung, namanya berubah menjadi PGSD-D2-S-1 UPI Kampus Purwakarta.

Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dewasa ini dalam program kerjanya menampilkan tiga program unggulan yaitu : Bidang Pendidikan, Bidang Agama dan Bidang Kesehatan. Realisasi dari program pemda diadakan kerja sama dengan tim pengembang. Bidang pendidikan mengadakan kerjasama dengan Team Pengembang Pendidikan Jawa Barat, memulai menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah, sedang dirintis pendidikan terpadu yang dikembangkan oleh para pakar pendidikan antara lain Prof. Dr. H. Djam' an Satori, MA, Prof Dr. H. Tb. Abin Syamsuddin Makmun, MA., Prof Dr. Nanang Fattah MPd., Prof. Dr, H, Abdul Azis Wahab, M.A. dan anggota team lainnya

Kondisi Pendidikan Dasar Negeri Purwakarta tahun 2003-2004 memiliki jumlah peserta didik sebanyak 95.301 orang. Jumlah kepala SD 418 orang, guru kelas 1.922 orang dan 813 orang guru sukwan. Jumlah sekolah 443 Unit dengan kondisi fisik sekolah pada tahun 2003-2004 sebesar 44,80 % bangunan sekolah dasar kurang baik. Pada bidang Pendidikan Agama setiap lulusan SD harus dapat baca tulis Alqur'an. Dalam bidang kesehatan layanan pengobatan bagi masyarakat terus ditingkatkan

Namun demikian kita sudah sama-sama maklum bahwa dewasa ini prestasi belajar yang diperoleh masih kurang memuaskan baik bagi orangtua, stakeholders maupun pemerintah, hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkembang dimasyarakat antara lain banyaknya VCD yang lebih menarik dari pada mengisi waktu belajar, penggunaan waktu senggang yang tidak terjadwal mengakibatkan penyitaan terhadap waktu untuk belajar, khusus bagi anak-anak pada tingkatan sekolah dasar lebih senang menghabiskan waktu untuk bermain

Play Station (PS) yang sudah merebah sampai di pelosok desa sehingga peserta didik lupa akan pelajaran termasuk pekerjaan rumah yang ditugaskan guru. Berdasarkan data hasil penelitian Ujian Nasional tahun 2003-2004 untuk mata pelajaran PPKn, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS menunjukkan hasil rata-rata 6,84. bagi Kelas VI Sekolah Dasar di Kabupaten Purwakarta.

Jika dilihat dari tenaga guru kelas ada 2.735 orang, maka kebutuhan guru di Kabupaten Purwakarta bagi sekolah dasar sebanyak 443 Unit bangunan sudah memenuhi target, namun demikian kualifikasi pendidikan guru (29,73 %) belum memiliki kualifikasi D-2. Kondisi pendidikan seperti ini merupakan permasalahan dalam implementasi pendidikan di Purwakarta sehingga memerlukan suatu perbaikan pengelolaan sekolah yang maksimal dalam meningkatkan mutu *mastery learning* dengan kriteria 75 %. Untuk mengatasi kekurangan inilah maka diperlukan pengelolaan sekolah yang serempak dan perbaikan kualitas yang bersifat terus menerus yang disebut dengan istilah Manajemen Mutu Terpadu (*Total Quality Management).*

Usaha meningkatkan mutu pendidikan nasional akan berhubungan pula dengan segi kuantitas maupun kualitas. Segi kuantitas menunjukkan tentang seberapa besar suatu program pendidikan dapat mencapai target sasaran, sedangkan segi kualitas mengarah pada segi-segi nilai dari suatu produk yang dikeluarkan. Peningkatan mutu harus didukung dengan tatanan sistem pendidikan yang menyentuh berbagai dimensi yang saling berkepentingan melalui cara-cara pengakomodasian berbagai potensi, baik yang terdapat dari dalam sistem pembelajaran, tenaga kependidikan, dana, sarana-prasarana, manajemen, siswa

maupun yang datang dari luar sistem berupa kebijakan publik, peraturan, opini publik dan harapan lokal.

Perubahan yang pesat di berbagai bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan paradigma pendidikan nasional maupun kelembagaan menghendaki institusi pendidikan untuk secara kritis melihat kembali peran dan kinerjanya selama ini. Institusi pendidikan makin banyak mendapatkan tekanan internal dan eksternal untuk meningkatkan daya saing, efektivitas, serta mengoptimalkan peluang kerja sama. Tekanan kepentingan *stakeholders* juga terkait dengan masalah pelayanan, akuntabilitas dan transparansi.

Ace Suryadi dan H.A.R. Tilaar (1993:159) mengungkapkan bahwa:

> Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, secara intensif telah, sedang, dan akan terus melaksanakan upaya peningkatan mutu pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan, paling tidak sejak awal periode pembangunan nasional jangka panjang pertama. Selama itu kita telah mengeluarkan biaya yang besar, tenaga yang banyak, waktu yang lama untuk meningkatkan mutu pendidikan, misalnya: melalui penataran guru, penyebaran buku dan alat pelajaran, pengembangan kurikulum, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan metode dan pendekatan mengajar, dan sebagainya. Namun demikian, selama itu pula dan sampai sekarang, mutu pendidikan masih tetap kita rasakan sebagai tantangan, mungkin sama dengan yang kita rasakan 20 tahun yang lalu. Dengan adanya masalah tersebut di atas mungkin karena kita belum secara optimal melakukan upaya peningkatan mutu; mungkin upaya-upaya yang telah kita lakukan lebih lambat dibandingkan dengan aspirasi kita tentang mutu pendidikan yang terus berubah dan berkembang; atau mungkin juga kita telah membidik barang yang keliru.

Pernyataan di atas mengisyaratkan bahwa kualitas menjadi kepedulian dan mendapat perhatian serius pemerintah maupun *stakeholders* yang terkait dengan pendidikan, walaupun secara nyata pendidikan nasional saat ini masih belum

sesuai dengan harapan peserta didik, orang tua, masyarakat, dan pemerintah sendiri. Dilihat dari output pendidikan melalui angka HDI (*Human Development Index*), Indonesia berada pada urutan ke 112 pada tahun 2002. Secara akademik, angka rata-rata nilai Ujian Akhir Nasional (UAN) pada tahun 1996 sampai dengan 2001 tidak berubah secara signifikan berkisar pada angka 6,0 – 6,5. Angka DO pada tahun 2001 pada tingkat SD sebesar 2,66 % atau sebanyak 683.056 siswa, SLTP sebesar 3,50 % atau sebanyak 262.728 siswa, SMU sebesar 2,20 % atau sebanyak 64.714 siswa.

Keragaman letak geografis, suku bangsa dengan aneka ragam budaya, adat istiadat, bahasa, serta keragaman kebutuhan akan pendidikan, dan pekerjaan, akan menambah tuntutan terhadap isi dan pola pelaksanaan pendidikan yang tidak seragam. Di samping itu masih banyak faktor-faktor lain yang menuntut adanya penanganan pelaksanaan pendidikan yang berbeda. Dengan kata lain, pendidikan di Indonesia masa kini dan dimasa datang akan jauh lebih rumit (kompleks) yang memerlukan penanganan yang lebih terencana dan sistematis, serta pengelolaan yang lebih baik. Dalam konsep manajemen pendidikan, pembinaan rasa keterikatan seluruh personil untuk selalu menjaga mutu (*quality assurance*) dikenal dengan istilah Manajemen Mutu Terpadu (*Total Quality Management*).

Sebagai suatu sistem, Manajemen Mutu Terpadu tidak hanya mengikis problem pendidikan, tapi sekaligus sebagai model yang mengutamakan perbaikan berkelanjutan. Penerapan Manajemen Mutu Terpadu dalam pendidikan mengutamakan pencapaian harapan pelanggan melalui upaya perbaikan terus

menerus, pembagian tanggung jawab dengan pegawai dalam rangka mengurangi pelajar yang keluar dari sekolah (*droup-out*), tidak naik kelas, dan tidak lulus.

Manajemen Mutu Terpadu menawarkan filosofi, metode, dan strategi baru perbaikan mutu pendidikan. Untuk memperbaiki mutu pendidikan diperlukan keterlibatan semua pihak. Karena perbaikan pendidikan bukan tanggung jawab perseorangan saja, namun semua pihak yang terkait dengan kebijakan dan operasionalisasi pendidikan bertanggung jawab untuk membenahi pendidikan kita. Para birokrat, teknokrat, dan politikus harus memiliki visi yang sama dan kepedulian menetapkan kebijakan untuk perbaikan pendidikan nasional. Guru harus bekerja satu sama lain, bahkan dengan para pelajar agar terjadi perubahan kinerja. Seseorang tidak bisa mengisolasi diri untuk mengelola suatu situasi pendidikan dalam berbagai problema yang terus meningkat. Seorang manajer harus berfungsi sebagai bagian kerjasama kelembagaan agar dapat menjamin keberhasilan perubahan dalam suatu lingkungan pendidikan kontemporer (kekinian).

Manajemen Mutu Terpadu (MMT) bertujuan memberikan kepuasan terhadap kebutuhan pelanggan seefisien mungkin. Bahkan Manajemen Mutu Terpadu (MMT) dalam pendidikan dapat menguntungkan semua pihak dengan syarat manajer yang memperbaiki kinerja pegawai dan organisasi secara terus menerus sejalan perkembangan internal dan eksternal organisasi. Kebutuhan akan perubahan yang didorong kekuatan internal mengakar pada persoalan sumber daya manusia (SDM) dan perilaku atau keputusan manajerial, sedangkan kekuatan eksternal adanya karakteristik demografi, kemajuan teknologi, perubahan pasar

dan tekanan politik, ekonomi dan sosial dalam skala regional, nasional maupun internasional.

Budaya sekolah harus diubah oleh kepala sekolah bersama dengan guru-guru, orang tua, dan pengurus komite sekolah. Perubahan adalah aksioma dari kehidupan suatu organisasi. Suatu organisasi dituntut untuk mampu merespon perubahan secara kreatif dan proaktif. Dengan begitu, organisasi tersebut akan memiliki keseimbangan secara baik antara kemungkinan stabilitas dan stagnasi atau kemajuan (*progress*). Begitu pula halnya organisasi pendidikan dalam mengantisipasi berbagai perkembangan internal dan eksternal diperlukan sikap antisipatif, kreatif, inovatif, dan proaktif perlu dimiliki manajer dan personel organisasi pendidikan. Sikap itu pada hakikatnya merupakan tindakan merencanakan dan mengarahkan perubahan sesuai visi untuk masa depan yang lebih baik. Dengan Manajemen Mutu Terpadu (MMT), organisasi sekolah dapat melaksanakan peningkatan kinerja dengan mempelajari dan menggunakan pengetahuan baru tersebut.

Untuk itu, setiap organisasi pendidikan sudah saatnya memperhatikan dan menerapkan Manajemen Mutu Terpadu (*Total Quality Management*) dalam rangka mengoptimalkan pencapaian mutu lulusannya. Manajemen Mutu Terpadu berfungsi efektif dalam berbagai organisasi, yaitu untuk meningkatkan kualitas *outcome* atau produk, sehingga dapat diterima oleh pelanggan atau pemakai dan dapat menghindari timbulnya kesalahan. Kegiatan pendidikan yang dilaksanakan harus diutamakan untuk mencapai kepuasan pelanggan pendidikan. Standar mutu, kepuasan pelanggan, kepemimpinan, dan tim kerja memegang peran penting

dalam mewujudkan mutu lulusan yang diinginkan. Karena itu, peranan alat dan teknik dalam peningkatan mutu menjadi bagian integral dalam Manajemen Mutu Terpadu pendidikan.

Sallis (1984) berpendapat bahwa *Total Quality Management* (TQM) berarti menjamin mutu dan standar dalam pendidikan. TQM memberikan suatu filosofi sebagai suatu perangkat alat untuk meningkatkan kualitas (mutu) dengan mengutamakan minat dan kebutuhan pelanggan. *Total Quality Management* dapat diterapkan di setiap sekolah dalam rangka perbaikan mutu, bahkan sekolah diharapkan mampu menciptakan keuntungan kompetitif (*competitif advantage*) dengan mutu yang tinggi. TQM yang merupakan strategi bisnis fundamental pada tahun 1990-an memberikan peluang bagi sekolah untuk mencapai keunggulan. Kemajuan di bidang pabrikasi, pelayanan, pemerintah, dan organisasi nonprofit lainnya dimungkinkan tercapai dengan *Total Quality Management*. Peningkatan kompetisi dan lingkungan yang tidak menentu terhadap organisasi ini adalah tantangan untuk maju.

Pencapaian kebutuhan pelanggan bagi mutu barang-barang dan pelayanan menjadi sasaran yang harus dikejar. Pendidikan juga dituntut dalam persaingan globalisasi untuk tidak mengabaikan mutu lulusannya agar jangan sampai ketinggalan zaman. Dengan kata lain, kekecewaan pelanggan pendidikan, dan rendahnya moral, kinerja, budaya, dan iklim kerja pegawai menyebabkan pendidikan terlambat majunya dibanding sektor lainnya.

Pemberlakuan otonomi daerah di bawah payung Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25

Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, menuntut para manajer atau pengelola lembaga pendidikan, khususnya rektor dan kepala sekolah, untuk mengadopsi manajemen mutu terpadu bagi peningkatan mutu lulusan institusi yang dipimpinnya. Aplikasi paradigma baru manajemen pendidikan terbuka luas dengan adanya otonomi sekolah atau otonomi perguruan tinggi. Sudah saatnya dunia pendidikan Indonesia memperhatikan peningkatan mutu sebagai bagian dari perubahan manajemen pendidikan.

Sistem pendidikan nasional harus dikelola dengan menerapkan manajemen mutu jika kita ingin mengurangi ketertinggalan dalam bidang pendidikan dari negara-negara tetangga di Asia. Dengan otonomi daerah, tuntunan perubahan pendidikan (*educational change*) merupakan peluang bagi jalan menuju perbaikan mutu. Bagaimanapun juga, tujuan perubahan pendidikan diasumsikan untuk menolong sekolah dalam mencapai tujuan secara lebih efektif dengan mengganti beberapa struktur (restrukturisasi), program-program dan penyelenggaraan (manajemen) dengan sesuatu yang lebih baik. Kemandirian pimpinan lembaga pendidikan semakin dituntut dalam era desentralisasi pendidikan. Kepala sekolah harus lebih mandiri dan mengembangkan otonomi untuk menggali semua sumber daya sekolah. Pemberdayaan sekolah dalam era otonomi tentu perlu diiringi akuntabilitas (pertanggungjawaban) yang tinggi.

Fullan dan Stiegelbauer (1991) berpendapat bahwa kepala sekolah yang efektif tidak mengabaikan stabilitas dalam perubahan yang baik. Perubahan tidak selalu kemajuan, karena itu kepala sekolah yang efektif akan memberikan perlindungan kepada sekolah dari perubahan yang tidak menguntungkan. Adapun

yang penting bagi kepala sekolah adalah cita-cita tinggi dengan menyadari bahwa banyak yang harus dilakukan bersama guru-guru dalam menentukan suatu perubahan yang menyenangkan. Sekolah adalah pusat perubahan. Sekolah adalah suatu organisasi. Perubahan organisasi lebih efektif bila mereka melakukan peran aktif dengan menolong atau mengarahkan perbaikan sekolah.

Kegagalan dalam perbaikan mutu pendidikan akibat manajemen yang lemah akan menimbulkan kegagalan generasi, baik dalam dimensi mikro maupun makro. Secara mikro, jika lembaga pendidikan tidak bermutu, SDM yang dihasilkan adalah generasi yang lemah dalam bidang ilmu, keterampilan, akhlak, iman, dan kreativitas. Akibat yang lebih jauh secara makro adalah akan terjadinya dominasi kebudayaan asing, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sains dan teknologi terhadap bangsa kita. Jangan sampai terjadi kehilangan generasi (*lost generation*) disebabkan rendahnya mutu pendidikan yang mengakibatkan bangsa Indonesia kekurangan sumber daya manusia (SDM) unggul untuk memimpin bangsa besar ini.

Suatu hal yang mendesak adalah memperkuat manajemen sekolah. Dalam hal mutu pendidikan, kita perlu belajar dari kemajuan yang dicapai Amerika, Jepang, dan Inggris. Manajemen Mutu Terpadu pendidikan yang diaplikasi telah mampu menjamin kepuasan harapan pelanggan (pelajar, orang tua dan *stakeholders)*, sehingga dukungan masyarakat semakin tinggi. Sedangkan kegagalan dalam mutu produk jasa bidang pendidikan akan mempercepat erosi keuntungan (*profit*) dan kepercayaan masyarakat. Para pelanggan melakukan penolakan untuk memanfaatkan SDM atau lulusan lembaga pendidikan karena

memandang rendahnya kualitas lulusan sekolah, sekolah negeri tidak dipercaya masyarakat dan lembaga pendidikan swasta menjadi ditinggalkan. Pada gilirannya, sekolah yang dijauhi dan ditinggalkan oleh masyarakat akan mengalami kebangkrutan (*collapse*) dan kehilangan kredibilitasnya. Untuk menghindari hal tersebut, sudah saatnya para pemimpin lembaga pendidikan di Indonesia melakukan gerakan mutu (*quality movement*) dalam bidang pendidikan dengan melakukan pembaruan manajemen menuju Manajemen Mutu Terpadu di setiap lembaga pendidikan.

Beberapa lembaga pendidikan bertindak konkrit dalam upaya perbaikan kualitas melalui penerapan secara konsisten *Total Quality Management* yang bersifat menyeluruh, sistemik, dan berkelanjutan guna menjawab tantangan penyelenggaraan pendidikan berkualitas. Penerapan TQM mensyaratkan adanya budaya, komitmen, dan komunikasi yang baik dalam suatu institusi. Lembaga yang efektif perlu mengembangkan strategi kualitas, karena itu masyarakat pendidikan khususnya tenaga pendidik atau pengajar, jajaran pengelola dan pimpinan lembaga pendidikan harus memiliki konsep dan strategi peningkatan mutu pendidikan yang merupakan bagian dari budaya lembaga pendidikan.

Dengan demikian budaya peningkatan mutu disetiap lembaga pendidikan bukan sekedar verbalisme yang berbau sloganisme, atau hanya sekedar "budaya musiman", namun harus diwujudkan melalui suatu proses yang disengaja, direncanakan, diorganisir dan dikendalikan oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan pendidikan di lembaga pendidikan melalui *team work spirit*.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, perlu dilakukan suatu program penelitian khusus tentang faktor-faktor determinan dalam implenentasi Manajemen Mutu Terpadu dan pengaruhnya terhadap kinerja sekolah dasar di Kabupaten Purwakarta. Penelitian ini merupakan upaya untuk melaksanakan pembinaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan sekolah dalam rangka implementasi Manajemen Mutu Terpadu yang efektif, sehingga dapat meningkatkan kinerja sekolah sebagai perwujudan dari desentralisasi pengelolaan pendidikan dan otonomi sekolah.

B. Rumusan Masalah

Formulasi masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah pengaruh faktor-faktor Determinan Manajemen Mutu Terpadu terhadap peningkatan kinerja sekolah pada sekolah dasar di Kabupaten Purwakarta?. Formulasi masalah tersebut secara rinci dirumuskan sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh faktor-faktor Determinan Manajemen Mutu Terpadu terhadap peningkatan kinerja sekolah dasar.
2. Seberapa besar pengaruh faktor Determinan Manajemen Mutu Terpadu kepemimpinan (*Leadership)* terhadap peningkatan kinerja sekolah dasar.
3. Seberapa besar pengaruh faktor Determinan Manajemen Mutu Terpadu pendidikan dan pelatihan (*Education and Trainning)* terhadap peningkatan kinerja sekolah dasar.
4. Seberapa besar pengaruh faktor Determinan Manajemen Mutu Terpadu dukungan sumber daya manusia (*Supportive Structure)* terhadap peningkatan kinerja sekolah dasar.

5. Seberapa besar pengaruh faktor Determinan Manajemen Mutu Terpadu komunikasi (*Communications)* terhadap peningkatan kinerja sekolah dasar.
6. Seberapa besar pengaruh faktor Determinan Manajemen Mutu Terpadu pengakuan dan penghargaan (*Recognition and Reward)* terhadap peningkatan kinerja sekolah dasar.
7. Seberapa besar pengaruh faktor Determinan Manajemen Mutu Terpadu standar penilaian (*Measurement Standards)* terhadap peningkatan kinerja sekolah dasar.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data tentang pengaruh faktor-faktor Determinan Manajemen Mutu Terpadu di sekolah dasar yang meliputi: kepemimpinan (*Leadership),* pendidikan dan pelatihan *(Education and Trainning),* dukungan sumber daya manusia (*Supportive Structure),* komunikasi *(Communications),* pengakuan dan penghargaan *(Recognition and Reward),* dan standar penilaian *(Measurement Standards)* terhadap peningkatan kinerja sekolah pada sekolah dasar di Kabupaten Purwakarta.

Keluaran penelitian untuk mendapatkan gambaran mengenai faktor-faktor determinan manajemen mutu terpadu dan saling keterkaitannya terhadap kinerja sekolah dasar

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang faktor-faktor determinan Manajemen Mutu Terpadu dan pengaruhnya terhadap peningkatan kinerja sekolah dasar di Kabupaten Purwakarta ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori, metodologi, serta empirik dibidang ilmu Administrasi Pendidikan umumnya, dan khususnya pada bidang manajemen pendidikan persekolahan.
2. Secara praktis operasional, penelitian tentang faktor-faktor determinan Manajemen Mutu Terpadu dan pengaruhnya terhadap peningkatan kinerja sekolah dasar di Kabupaten Purwakarta akan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam melakukan perencanaan, penetapan kebijakan, dan penyusunan program perbaikan, peningkatan, dan pengembangan kualitas kinerja sekolah.

E. Kerangka Penelitian

Perubahan paradigma pendidikan nasional maupun kelembagaan menghendaki institusi pendidikan untuk secara kritis melihat kembali peran dan kinerjanya selama ini. Hal tersebut mengakibatkan institusi pendidikan semakin dituntut untuk meningkatkan daya saing, efektivitas, mengoptimalkan peluang kerja sama, pelayanan, akuntabilitas, dan transparan. Dengan demikian, kualitas mendapat kepedulian dan perhatian yang serius dari pemerintah maupun *stakeholders* yang terkait dengan pendidikan, walaupun secara nyata pendidikan nasional saat ini masih belum sesuai dengan harapan peserta didik, orang tua, masyarakat, dan pemerintah sendiri, baik segi kuantitas maupun kualitas.

Segi kuantitas menunjukkan tentang seberapa besar suatu program pendidikan dapat mencapai target sasaran, sedangkan segi kualitas mengarah kepada segi-segi nilai dari suatu produk yang dikeluarkan. Hal tersebut harus didukung dengan tatanan sistem pendidikan yang menyentuh berbagai dimensi yang saling berkepentingan melalui cara-cara pengakomodasian berbagai potensi, baik yang terdapat dari dalam sistem yaitu: pembelajaran, tenaga kependidikan, dana, sarana prasarana, manajemen, dan siswa, maupun yang datang dari luar sistem, kebijakan publik, peraturan, opini publik dan harapan lokal. Dengan kata lain, pendidikan di Indonesia masa kini dan di masa datang akan jauh lebih rumit, sehingga memerlukan penanganan yang lebih terencana dan sistematis, serta pengelolaan yang lebih baik.

Total Quality Management (TQM) adalah filosofi yang mengutamakan perbaikan berkelanjutan. Penerapan manajemen mutu terpadu dalam pendidikan mengutamakan pencapaian harapan pelanggan melalui upaya perbaikan terus menerus, pembagian tanggung jawab dengan pegawai dalam rangka mengurangi pelajar yang keluar dari sekolah (*droup-out*), tidak naik kelas, dan tidak lulus. Dalam memperbaiki mutu pendidikan diperlukan keterlibatan semua pihak. Karena perbaikan pendidikan bukan tanggung jawab perseorangan saja, namun semua pihak yang terkait dengan kebijakan dan operasionalisasi pendidikan bertanggung jawab untuk membenahi pendidikan dan harus memiliki visi yang sama dan kepedulian menetapkan kebijakan untuk perbaikan pendidikan nasional.

Total Quality Management memberikan suatu perangkat alat untuk meningkatkan kualitas (mutu) dengan mengutamakan minat dan kebutuhan

pelanggan yang dapat diterapkan di setiap sekolah dalam rangka perbaikan mutu. Sekolah diharapkan mampu menciptakan keuntungan kompetitif (*competitif advantage*) dengan mutu yang tinggi. Peningkatan kompetisi dan lingkungan yang tidak menentu terhadap organisasi ini adalah tantangan untuk maju.

Pencapaian kebutuhan pelanggan bagi mutu barang-barang dan pelayanan menjadi sasaran yang harus dikejar. Pendidikan juga dituntut dalam persaingan global untuk tidak mengabaikan mutu lulusannya agar jangan sampai ketinggalan zaman. Dengan kata lain, kekecewaan pelanggan pendidikan, dan rendahnya moral, kinerja, budaya, dan iklim kerja pegawai menyebabkan pendidikan terlambat majunya dibanding sektor lainnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Rowe (1990) yang digambarkan sebagai berikut:

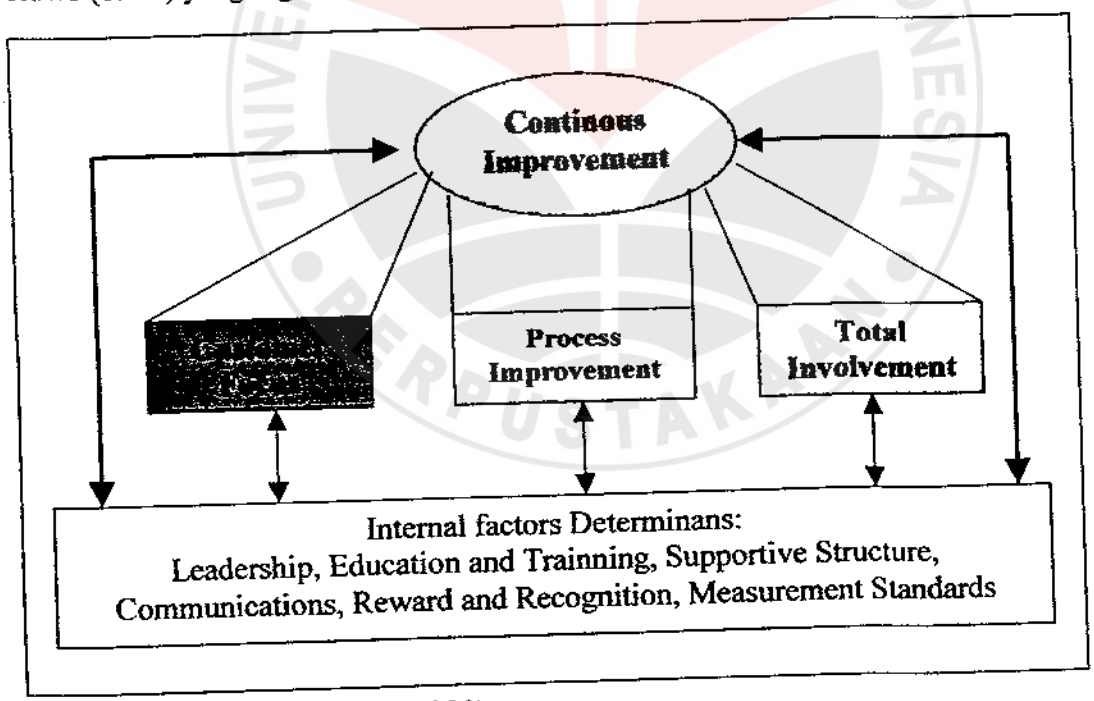

Sumber: Rowe, Alan J.et all (1990)

Gambar 1.1

Faktor-faktor Internal yang Berpengaruh dalam Implementasi Manajemen Mutu Terpadu untuk Peningkatan Mutu Lembaga

Penerapan *Total Quality Mangement* mensyaratkan adanya budaya, komitmen, dan komunikasi yang baik dalam suatu institusi. Lembaga yang efektif perlu mengembangkan strategi kualitas, karena itu masyarakat pendidikan khususnya tenaga pendidik atau pengajar, jajaran pengelola dan pimpinan lembaga pendidikan harus memiliki konsep dan strategi peningkatan mutu pendidikan yang merupakan bagian dari budaya lembaga pendidikan.

Dengan demikian diperlukan untuk melihat pengaruh dari faktor-faktor determinan dalam Manajemen Mutu Terpadu terhadap peningkatan kinerja sekolah. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk melaksanakan pembinaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan sekolah dalam rangka implementasi Manajemen Mutu Terpadu yang efektif dalam peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan uraian di atas, landasan berpikir secara ilmiah dalam penelitian ini dapat diringkas sebagai berikut:

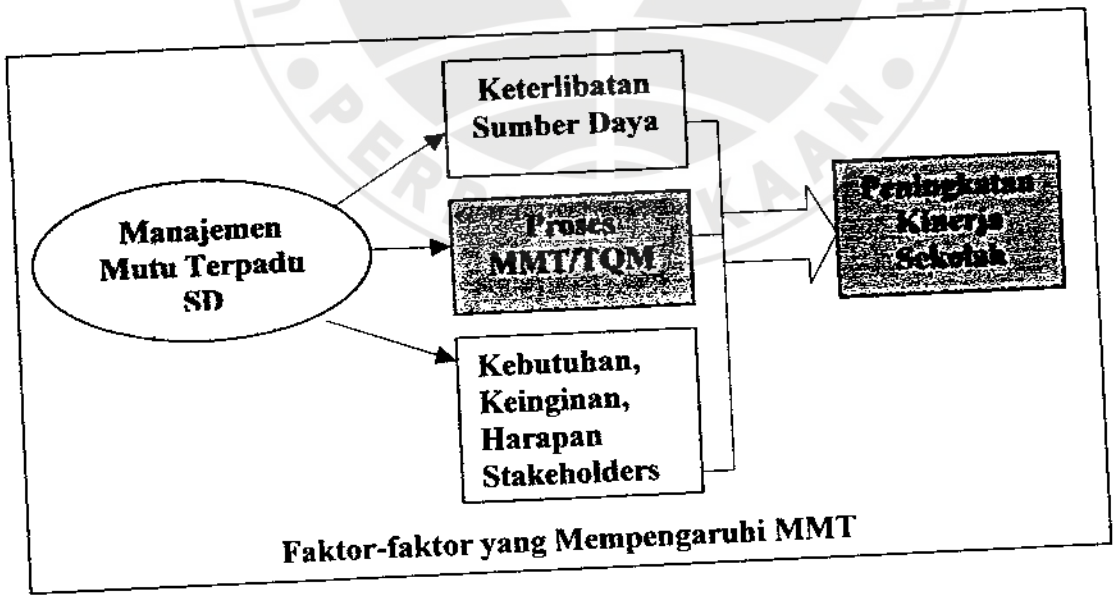

Gambar 1.2

Kerangka Penelitian

F. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir di atas dengan merujuk pada masalah dan tujuan penelitian ini, diajukan formulasi pokok bahwa: "Bagaimana Pengaruh Faktor-Faktor Determinan Manajemen Mutu Terpadu terhadap Peningkatan Kinerja Sekolah pada Sekolah Dasar di Kabupaten Purwakarta?. Untuk dapat menjawab formulasi pokok tersebut, maka dalam penelitian ini ditunjang dengan hipotesis sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif faktor Kepemimpinan *(Leadership)*, terhadap kinerja sekolah dasar.
2. Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif faktor pendidikan dan pelatihan *(Education and Trainning)*, terhadap kinerja sekolah dasar.
3. Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif faktor dukungan sumber daya manusia *(Supportive Structure)* terhadap kinerja sekolah dasar..
4. Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif faktor komunikasi *(Communications)* terhadap kinerja sekolah dasar.
5. Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif faktor pengakuan dan penghargaan *(Recognition dan Reward)* terhadap kinerja sekolah dasar.
6. Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif faktor standar penilaian *(Measurement Standards)* terhadap kinerja sekolah dasar.
7. Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif faktor-faktor determinan Manjemen Mutu Terpadu, terhadap kinerja sekolah dasar.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Metode Survei Penjelasan (*Explanatory Survey Method*) dengan pendekatan kuantitatif melalui hubungan kausal dengan Teknik Analisis Jalur (*Path Analysis*). Jenis data dalam penelitian terdiri dari data primer dan sekunder.

Data primer diperoleh dari responden menggunakan teknik komunikasi tidak langsung dengan instrumen pengumpul data berupa kuesioner. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber tertulis menggunakan teknik komunikasi langsung dengan studi dokumentasi.

Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Manajemen Mutu Terpadu (MMT) Terhadap Peningkatan Kinerja Sekolah Dasar di Kabupaten Purwakarta. Sedangkan sasaran populasi penelitian adalah Kepala Sekolah. Negeri yang tersebar di 15 Kecamatan di Kabupaten Purwakarta.

Variabel penelitian dalam penelitian ini terdiri dari Variable X (yaitu faktor-faktor Determinan Manajemen Mutu Terpadu) dan Variable Y Kinerja Sekolah. Selanjutnya kedua faktor dibuatkan jalurnya sebagai berikut:

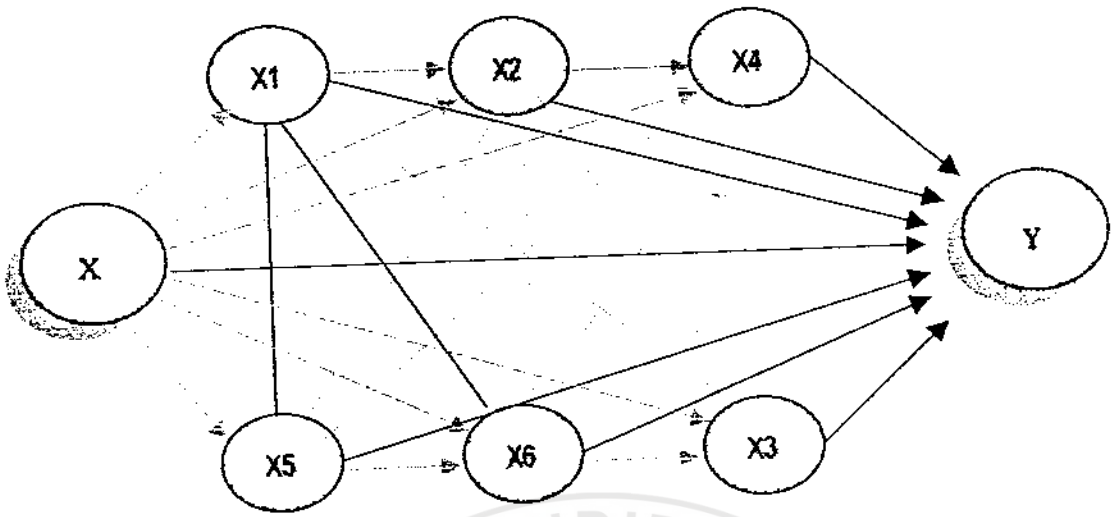

Gambar 1.3

Hubungan antara Variabel Penelitian

Keterangan:

——— Jalur positif

..... Jalur negatif, karena aspek individual menyatu.

X_1 = Kepemimpinan *(Leadership)*.

X_2 = Pendidikan dan Pelatihan *(Education and Trainning)*.

X_3 = Dukungan Sumber daya manusia *(Supportive Structure)*.

X_4 = Komunikasi *Communications)*.

X_5 = Pengakuan dan penghargaan *(Recognition dan Reward)*.

X_6 = Standar Penilaian *(Measurement Standards)*.

Y = Kinerja Sekolah meliputi (Persepektif keuangan, pelanggan, penilaian inti, dan proses bisnis internal).